

ANALISIS PENGEMBANGAN BUMDES DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR)

Yona Afrina

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze the development of Bumdes in Kampa District, Kampar Regency. The research was conducted in Kampar District, Riau Province, which is one of the 12 districts / cities in Riau Province. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data (first-hand data) is data obtained directly from research subjects while secondary data is supporting data that has been published and obtained from books, magazines, and so on related to this research. In this research, Analyze Development of Bumdes, this type of field research analyzes the data using descriptive qualitative methods. Based on the results of the study, it is known that in the development analysis of the 5 bumdes studied, the researcher only compared 2 Bumdes based on the profitability ratio. From the results of this study, the profitability ratio at Bumdes Sejahtera, namely Return On Asset, decreases every year but is still in the very good criteria stage, then Return On Equity at a prosperous bumdes fluctuates but is still in very good criteria, Operational Expenses to Operating Income increase each year, therefore the criteria are very good while for Net profit Margin decreases every year so it has very bad criteria this is due to the large number of bad loans from borrowers. Bumdes In Kampa District, there are almost the same obstacles, in general, such as Human Resource Weaknesses, inaccurate selection of business units and business management. From the results of this study, it is hoped that BUMDes in Kampa District, Kampar Regency, will further enhance the development of the village's original local potential. That way, the economy in each village will continue to increase and be independent.

Keywords: Development of Bumdes, profitability

LATAR BELAKANG PENELITIAN

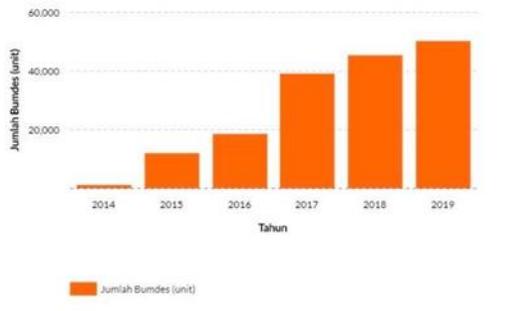
adil, dan merata merupakan hal yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perekonomian baik itu nasional maupun daerah karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan. Namun kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam kehidupan ekonominya.

Menurut Kartasasmita dalam (Isyandi, 2007) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan yang harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan, yaitu: pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memajukan dan memandirikan masyarakat desa; Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu

ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun informal. Kelembagaan yang dibutuhkan dipedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu peerkonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah ada semejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sebagai unit terkecil dari Negara, desa secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa termasuk kedalam kategori desa tertinggal.(Arafat,2018). Salah satu strategi untuk menanggulangi hal ini adalah mewujudkan kewirausahaan dan pengembangan potensi local pada desa dimana sumberdaya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat desa untuk merubah kondisi perekonomian dan social pedesaan

Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa seabagai uapaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Mendes PD TT, 2019

Gambar. 1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menanjak tajam dari 1.022 unit pada tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019, dan diperkirakan jumlah Bumdes meningkat setiap tahunnya. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dan menjadi kebijakan dalam upaya membangun kawasan pedesaan. Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (BUMDes) tercatat sebanyak 41.000 unit diseluruh Indonesia. BUMDes ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indoneisa.(www.republika.co.id)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, dalam pelaksanaannya pengembangan Bumdes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dikatakan baik, namun masih memiliki kendala sehingga belum sepenuhnya maksimal dalam pengelolaan potensi desa. Pengembangan Bumdes sebagai basis ekonomi warga saat ini masih banyak kendala antara lain ketidak pahaman warga tentang BUMDes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, kredit macet, insentif kecil, pembentukan kepengurusan, kendala tersebut dapat menghambat cita-cita BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian tingkat desa, yang mana diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa, mendukung pengembangan usaha warga dengan menampung produk yang mereka hasilkan dan memberikan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses

produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Mengingat potensi perekonomian Desa yang ada di Kecamatan Kampa, dari adanya potensi tersebut dan jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan dengan adanya Bumdes keinginan masyarakat bisa terwujud.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Keuangan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdsarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun hak dan kewajiban desa tersebut adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban.

Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Andrian & Julia)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). (PKDSP.2017). Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undangundangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pengembangan Bumdes

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu

Pengembangan Bumdes yaitu dengan pemberian penguatan dan pengembangan bumdes kepada unit usaha di bumdes hanya sebagai pendorong tambahan modal usaha. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan

potensi desa adalah: (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab. (2) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. (3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran unit pengelola keuangan dan usaha sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. (4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha. (5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa/kelurahan yang disesuaikan dengan karekteristik tipologi desa/kelurahan. (Soleh, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi Yaitu pengumpulan data atau informasi dengan mengamati langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.
2. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, mulai interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan media, dengan tujuan memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.
3. Dokumentasi dan Studi Literatur Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bandung. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling non probability* melalui *accidental sampling*. Sehingga pengambilan sampel dilakukan secara kebetulan ada di tempat penelitian sebanyak 100 responden disesuaikan dengan perhitungan persentase sampel Yount (1999) sebesar 5% dari populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengembangan Bumdes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

1. Bumdes Sejahtera

Perbandingan Pengembangan Rasio Profitabilitas Bumdes Sejahtera Tahun 2016-2019:

- a. Dari rasio Return On Asset (ROA) bumdes Sejahtera dapat dilihat dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2016-2019, hasil analisis ROA menunjukkan nilainya berfluktuatif pada tahun 2016 sebesar 6.80% lalu turun menjadi 5.58% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 2,19% angka penurunan ini cukup besar dikarenakan pada tahun tersebut sisa hasil usaha diperoleh bumdes sedikit merosot lalu pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 3,20% artinya pengembangan Nilai Return On Asset pada bumdes Sejahtera menurun setiap tahunnya. Namun nilai ROA pada bumdes masih dikategorikan sangat baik karena berada di atas >1.5%

- b. Hasil analisis Return On Equity (ROE) bumdes Sejahtera menunjukkan pada tahun 2016 sebesar 64,38% lalu meningkat menjadi 65,44% dan pada tahun 2018 sebesar 24,36% dan meningkat pada tahun 2019, namun masih di bawah kriteria sangat baik
- c. Hasil analisis BOPO pada Bumdes Sejahtera mengalami kenaikan setiap tahunnya, terbukti pada tahun 2016 sebesar 65,33%, lalu meningkat pada tahun 2017 sebesar 65,75%, lalu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018 sebesar 70,66% dan pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 71,48% dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan Bumdes Sejahtera dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional sangat baik,
- d. Dari hasil rasio Net profit margin (Margin Laba Bersih) menunjukkan bahwa Bumdes Sejahtera selama kurun waktu 4 tahun (2016-2019) didapatkan nilai rasio tahun 2016 sebesar 36,66%, tahun 2017 sebesar 5,58%, tahun 2018 sebesar 3,39% dan tahun 2019 sebesar 3,20%. Apabila dilihat secara Tren, rasio NPM bumdes Sejahtera cukup fluktuatif yang cenderung menurun. Hal ini dikarenakan besarnya tunggakan dari peminjam dana pada unit usaha simpan pinjam pada Bumdes Sejahtera. Adapun hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 responden dilihat dari karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, jumlah anak, dan masa kerja. Dimana responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki (53%) lebih banyak dibandingkan responden perempuan (47%). Responden berdasarkan usia 31-40 tahun (43%) memiliki persentase terbesar, sedangkan usia 51-60 tahun (8%) memiliki persentase terendah. Selanjutnya semua responden berdasarkan status pernikahan menyatakan telah menikah (100%), dan memiliki 1-3 anak (94%) menjadi persentase terbesar. Responden berdasarkan masa kerja 11-20 tahun (60%) memiliki persentase terbesar, sedangkan masa kerja 1-5 tahun (5%) memiliki persentase terkecil.

2. Bumdes Mulya

Perbandingan Pengembangan Rasio Profitabilitas Bumdes Mulya Tahun 2016-2019:

- a. Dari rasio ROA bumdes Mulya dapat dilihat dalam kurun waktu 2 tahun, hasil analisis ROA menunjukkan berfluktuatif dan menurun setiap tahunnya, namun masih di atas standar kriteria penilaian sehingga kriteria penilaian ROA pada bumdes Sejahtera sangat baik. Hal ini terjadi karena sisa hasil usaha meningkat sehingga aktiva pada Bumdes bertambah
- b. Hasil analisis ROE bumdes Mulya menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 13,14% lalu meningkat menjadi 78,14%, hal ini dikarenakan Bumdes Mulya sangat efektif dan efisien dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan.
- c. Hasil analisis BOPO pada Bumdes Mulya tidak mengalami kenaikan. dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan Bumdes Mulya dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional masih belum meningkat tapi masih dalam kriteria sangat baik, karena nilai BOPO pada tahun 2018-2019 di atas

- d. Dari hasil rasio Net profit margin (Margin Laba Bersih) menunjukkan bahwa Bumdes Mulya selama kurun waktu 2 tahun (2018-2019) didapatkan nilai rasio tahun 2018 sebesar 30%, tahun 2019 menurun menjadi sebesar 29,97%. Apabila dilihat secara Tren, rasio NPM bumdes Mulya yang menurun sebesar 0,03%. Hal ini dikarenakan rusaknya mesin pertamini pada unit usaha Bumdes Mulya.
- e. Net Present value, menunjukkan bahwa $NPV = 92,186,583 - 191,099,830 = -98,913,246.85$. NPV bernilai negative artinya,

Kontribusi Laba Usaha Bumdes Terhadap APBDes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

1. Bumdes Sejahtera

Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Bungo sudah memberikan kontribusi setiap tahun terhadap APBDes, hal ini telah sesuai dengan tujuan pendirian Bumdes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan penadapan asli desa.

Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Bumdes Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

1. Bumdes Sejahtera

- a. Terjadinya kredit macet pada unit usaha simpan pinjam
- b. Kelemahan Sumberdaya Manusia (SDM), hal ini bisa dilihat dari kurang pengetahuan pengurus dalam pembuatan laporan keuangan yang berdasarkan akuntansi keuangan.
- c. Tidak adanya SOP dalam peminjaman dana, sehingga hal ini sangat beresiko pada bumdes itu sendiri karena dana yang dipinjam bisa saja hilang tanpa adanya prosedur yang jelas dan pasti, selain itu peminjam yang memiliki tunggakan masih bisa melakukan pinjaman.

2. Bumdes Mulya

- a. Kelemahan SDM sebagai penggerak organisasi, hal ini dilihat dari tidak aktifnya pengurus dalam mengelola unit usaha pada Bumdes dan ketidakpahaman pengurus dalam membuat laporan keuangan
- b. Pemilihan unit usaha dan lokasi yang tidak tepat, artinya unit usaha yang dibentuk tidak berdasarkan potensi yang ada di Desa Sawah Baru, hal ini mengakibatkan unit usaha yang dijalankan tidak efektif dan letaknya yang tidak strategis, karena bumdes ini terletak disebalah pasar tradisional, hal ini membuat masyarakat sekitar lebih memilih berbelanja pada pasar ketimbang di warung harian milik Bumdes Maju Bersama.

3. Bumdes Mulya

- a. Factor SDM yaitu Ketidakpahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan keuangannya tidak sesuai standar akuntansi

- b. Sering terkendala pada Mesin pertamini yang sering rusak sehingga menghambat dari kegiatan unit usaha

4. Bumdes Usaha Baru

- a. Faktor SDM yaitu Kurang aktifnya pengurus dalam pengelolaan Bumdes, sehingga selama kurang lebih 2 tahun bumdes tersebut tidak berjalan dan tidak aktif. Dan kemudian ada juga anggota yang mengundurkan diri. Selain itu ketidakpahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan
- b. Sering terlambatnya jadwal pupuk masuk ke desa

5. Bumdes Mulya

- a. Factor SDM yaitu Pembentukan unit usaha yang tidak tepat mengakibatkan kurang peminatnya sehingga hal ini berdampak terhadap keberlangsungan bumdes tersebut sebagai roda ekonaomi desa selain itu ketidakpahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan
- b. Tidak adanya pemasaran yang dilakukan Bumdes untuk memperkenalkan unit yang mereka kelolah kepada desa lainnya. *Burnout* yang dianalisis terdiri dari tiga dimensi yaitu kelelahan fisik, depersonalisasi, dan pencapaian diri rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Bumdes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dari 5 bumdes yang diteliti, peneliti hanya mengkomparatifkan 2 Bumdes berdasarkan rasio profitabilitas yaitu Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Bungo dan Bumdes Mulya Desa Pulau Birandang. Dari hasil penelitian tersebut bahwa rasio profitabilitas pada Bumdes Sejahtera yaitu Return On Assetnya menurun setiap tahun namun masih dalam tahap kriteria sangat baik, lalu Return On Equity pada bumdes sejahtera berfluktuatif namun masih berada di kriteria sangat baik, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional tiap tahunnya meningkat maka dari itu kriteria nya sangat baik sedangkan untuk Net profit Marginnya setiap tahun menurun sehingga memiliki kriteria yang sangat tidak baik hal ini dikarenakan banyaknya kredit macet dari para peminjam dana.
2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengembangan Bumdes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
 - a. Bumdes Sejahtera : (1) terjadinya kredit macet dalam usaha simpan pinjam (2) Kelemahan Sumberdaya Manusia (SDM), (3) tidak ada SOP peminjaman
 - b. Bumdes Maju Bersama : (1) Kelemmahan SDM sebagai penggerak organisasi (2) pemilihan unit usaha tidak tepat

- c. Bumdes Mulya : (1) Factor SDM yaitu Ketidak pahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan, (2) mesin pertamini yang cepat rusak,
- d. Bumdes Usaha Bersama: (1) Faktor SDM yaitu Kurang aktivnya pengurus dalam pengelolaan Bumdes, (2) Sering terlambatnya jadwal pupuk masuk ke desa, hal ini membuat aktivitas pada bumdes Usaha Baru tidak efektif
- e. Bumdes Delima : (1) Factor SDM yaitu Pembentukan unit usaha yang tidak tepat mengakibatkan kurang peminatnya sehingga hal ini berdampak terhadap keberlangsungan bumdes tersebut sebagai roda ekonaomi desa selain itu ketidakpahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan (2) Tidak adanya pemasaran yang dilakukan Bumdes untuk memperkenalkan unit yang mereka kelolah kepada desa lainnya.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Bumdes di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar lebih meningkatkan pengembangan potensi lokal asli desa. Dengan begitu nantinya perekonomian di masing-masing Desa akan terus meningkat dan mandiri;
2. Bagi Masyarakat, Dari hasil penelitian ini di harapkan masyarakat selalu antusias dengan keberadaan BUMDes, dan ikut bekerjasama dalam mengembangkan potensi lokal agar lebih optimal dan di desa-desa akan menjadi perekonommian yang mandiri
3. Pemerintah Daerah, Mendorong kebijakan dan program strategis dalam penguatan dan pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan (Bumdes) yang merupakan turunan RPJPD dan RPJMD serta Renstra SKPD

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Puspawijaya. & Julia. Pengelolaan Keuangam Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.Skripsi.UIN Raden Intan.Lampung
- Badan Pusat Statistik Riau. 2019. Kampar Dalam Angka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka
- Depdiknas.2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Isyandi,2007. Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- jdih. Kemenkeu.go.id diakses tgl 25 mei 2019 pukul 10.33 wib
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), 2019 Yogyakarta : BPFE -Yogyakarta

- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai
Republika.co.id.<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pissvc383-kemendes-jumlah-bumdes-mencapai-41-ribu-unit> (diunggah 16 juni 2019, 22.31wib)
- Kemendes.go.id.http://datin.kemendes.go.id/simpورا/rep_bumdessmry.php?cmd=search&sv_nama_provinsi=RIAU&sv_nama_kabupaten=KABUPATEN+KAMPAR&sv_nama_kecamatan=KAMPAR+KIRI+TENGAH (diunggah 16 Juni 2018, 23.34)